

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen (Keadilan) terhadap variabel dependen (persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak)
- b. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen (sistem perpajakan) terhadap variabel dependen (persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak)
- c. Untuk menganalisis pengaruh variabel independen (sanksi perpajakan) terhadap variabel dependen (persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak).

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dalam penelitian “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak” ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) X yang berada di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen (Y) yaitu Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak dan untuk variabel independen (X)

ada tiga variabel yaitu Keadilan (X1), Sistem Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3).

Untuk lebih jelasnya dapat dituliskan sebagai berikut :

Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

X1 = Keadilan

X2 = Sistem Perpajakan

X3 = Sanksi Perpajakan

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu penelitian pustaka yang dimana Pengumpulan data dimulai dengan tahap penelitian pendahuluan, yaitu melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku–buku bacaan yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, internet dan penelitian lapangan. Penelitian Lapangan, data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama berupa kuesioner. Pada penelitian ini data kuesioner diberikan kepada Wajib Pajak pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta khususnya Jakarta Selatan.

D. Populasi dan Sampling

Untuk menetapkan sebuah sampel, sangat penting memerhatikan populasi, karena populasi mencakup seluruh unsur dari karakteristik observasi yang akan diamati. Pada tahap ini peneliti menentukan elemen-elemen apa saja yang penting atau relevan dengan penelitian yang dilakukan (Yvonne Augustine dan Robert

Kristaung, 2013:76). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak X di Jakarta khususnya di Jakarta Selatan.

Menurut Yvonne Augustine dan Robert Kristaung (2013:76) Sampling merupakan proses dalam memilih beberapa elemen dari karakteristik populasi yang akan diobservasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sampling frame atau kerangka sample, tipe sample yang akan dipilih dan jumlah sampel yang dibutuhkan. Kerangka sampel merupakan daftar semua unsur populasi yang menjadi perhatian peneliti.

Agar ukuran sampel yang diambil dapat *representative*, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin berikut rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = batas kesalahan yang masih dalam batas toleransi, dalam penelitian ini menggunakan 5%

Pada penelitian menggunakan Teknik sampel aksidental atau istilah lainnya *convenience sampling*, yaitu teknik yang digunakan untuk memilih sampe secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan kebetulan sesuai criteria makan responden tersebut akan menjadi sumber data atau bisa diartikan juga sebagai cara pengambilan sampel secara sederhana (Yvonne Augustine dan Robert Kristaung, 2013:81).

E. Operasional Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kuesioner. Kuesioner berisi pernyataan-pernyataan yang diajukan kepada responden dengan skala likert penilaian paling rendah adalah angka 1 sampai dengan paling tinggi yaitu angka 5 untuk pertanyaan positif dan sebaliknya untuk pertanyaan negatif.

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

1. Variabel Dependen

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perilaku penggelapan pajak.

1.1 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

1) Definisi Konseptual

Menurut Harry Graham Balter (Rahayu, 2010:147), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah Usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekalu menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan. Muncul pendapat dari Nickerson et al., (2009) pada Reskino (2013) menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi dari item-item yang diuji, yaitu (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, (2)

sistem perpajakan, yang terkait dengan tingkat tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu.

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak pada variabel ini dikembangkan oleh Nickerson (2009) dalam Reskino (2013) diukur dengan Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang digunakan, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.

2.1 Keadilan

1) Definisi Konseptual

Dalam penerapan pajak suatu Negara yang harus diperhatikan adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak merupakan suatu beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak oleh Negara.

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel Keadilan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Siahaan (2010) pada Suminarsasi (2011) Variabel ini diukur dengan berdasarkan 3 (Tiga) Pendekatan aliran prinsip manfaat dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

2.2 Sistem Perpajakan

1) Definisi Konseptual

Pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia di usahakan tersusun sistem perpajakan yang sederhana yaitu adanya kepastian hukum dan bertujuan untuk memberikan pemerataan perekonomian. Kesederhanaan diperlukan agar mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh wajib pajak ataupun fiskus (Rahayu, 2010). Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional.

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel Sistem Perpajakan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh salah satu dimensi dari Nickerson (2009) pada Reskino (2013) dan Rahayu (2010:102). Variabel ini diukur dengan

berdasarkan Penerapan sistem perpajakan secara menyeluruh kepada masyarakat dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

2.3 Sanksi Perpajakan

1) Definisi Konseptual

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Ni ketut Muliasari, 2010).

2) Definisi Operasional

Pengukuran variabel Sanksi Perpajakan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Ni Ketut Muliasari (2010) Variabel ini diukur dengan berdasarkan Penegakkan Sanksi pajak serta diukur dengan menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (1) Sangat setuju, (2) Setuju, (3) Netral, (4) Tidak setuju, (5) Sangat tidak setuju.

Tabel III.1 Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Sumber	Dimensi	Indikator	Pernyataan
Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak (Y)	1. Nickerson (2009) pada Reskino (2013) 2. Mardiasmo (2010) pada Suminarsasi (2011)	Keadilan	1.Mengenakan Pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing	1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika saya tidak mampu membayar pajak. 2.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika pajak yang dikumpulkan dipergunakan secara tidak merata, misalnya masih banyak daerah yang tidak merasakan dampak pembangunan akan adanya pajak. 3.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis, jika sebagian besar digunakan untuk proyek yang tidak memberikan keuntungan bagi saya
		Sistem Perpajakan Diskriminasi	1.Penerapan tarif pajak dan pentingnya kerjasama yang baik antara fiskus dan wajib pajak	1.Menurut saya, penggelapan pajak adalah etis, jika tarif pajak yang dikenakan terlalu tinggi. 2.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika petugas pajak tidak memiliki moralitas pajak yang baik,

				<p>sehingga mendukung adanya penggelapan pajak.</p> <p>3. Menurut saya, fiskus pajak harus melaksanakan tugasnya sistem pajak dengan baik dan benar serta menghargai hak dan kewajiban wajib pajak.</p>
			<p>1. Pendiskriminasi atas agama, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial</p>	<p>1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis apabila terdapat diskriminasi dalam perpajakan.</p> <p>2. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah mendiskriminasi saya karena agama, ras dan etnis/budaya.</p>
Keadilan (X1)	1. Siahaan (2010) pada Suminarsasi (2011)	Prinsip Keadilan Pajak	1. Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak.	<p>1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis, karena fiskus pajak yang mengabaikan redistribusi jasa-jasa publik.</p> <p>2. Menurut saya, fiskus pajak harus memberikan jasa-jasa publik sesuai uang pajak yang saya bayar.</p>

			<p>2.Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak</p> <p>3.Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemugutan pajak</p>	<p>1.Saya membayar pajak sesuai dengan kemampuan saya</p> <p>2.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis karena pembayaran dianggap sebagai pembebanan pajak</p> <p>1.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika saya memiliki penghasilan rendah tetapi kewajiban membayar pajak saya sama dengan wajib pajak yang berpenghasilan tinggi.</p> <p>2.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika memiliki penghasilan tinggi maka kewajiban membayar pajak saya juga tinggi.</p>
Sistem Perpajakan (X2)	<p>1.Nickerson (2009) pada Reskino (2013)</p> <p>2. Rahayu (2010:102)</p>	Penerapan sistem perpajakan secara menyeluruh kepada masyarakat	1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia	<p>1.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika tarif pajak dikenakan oleh Wajib Pajak (WP) tidak sesuai dengan tingkat penghasilan WP.</p> <p>2.Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis meskipun tarif pajaknya rendah.</p>

			2. Kemudahan fasilitas Sistem pemungutan Perpajakan	<p>1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil dan tidak efisien.</p> <p>2. Menurut saya, prosedur perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya.</p> <p>3. Menurut saya, Dirjen Pajak belum memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.</p>
Sanksi Pajak (X3)	1. Ni Ketut Muliastuti (2010)	Penegakkan sanksi pajak	<p>1. Rasa takut pada sanksi pajak.</p> <p>2. Konsekuensi pada sanksi administrasi</p>	<p>1. Hukum pajak yang lemah tidak membuat saya takut untuk melakukan penggelapan pajak</p> <p>1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika konsekuensi pada sanksi administrasi tidak cukup berat.</p> <p>2. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap tidak etis jika konsekuensi pada sanksi administrasi sangat berat.</p>

			3. Konsekuensi pada sanksi pidana	<p>1. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap etis jika konsekuensi pada sanksi pidana tidak cukup berat.</p> <p>2. Menurut saya, penggelapan pajak dianggap tidak etis jika konsekuensi pada sanksi pidana sangat berat.</p>
--	--	--	-----------------------------------	--

Sumber: Data Diolah peneliti (2014)

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dan memberikan gambaran atau deskripsi suatu data pada variabel penelitian.

Pada penelitian menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis pada pengujiannya. Pengujian kualitas data, uji asumsi klasik, serta pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan teknologi komputer yaitu, program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) 16.0. Dalam penelitian Pengujian kualitas data yang dilakukan adalah uji validitas dan reabilitas, sedangkan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedatitas.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode yang berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data sehingga dapat memberikan informasi yang berguna

berdasarkan keadaan yang umum. Informasi yang berguna seperti mengenai mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif juga memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19)

2. Pengujian Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

2.1 Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrumen tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Pada penelitian ini diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Tetapi ada metode yang lebih handal untuk menguji data mempunyai distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari distribusi normal. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik dengan melihat histogram dari residualnya. Namun sangat dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik Zskweness yang dimana melihat nilai kurtosis dan skwness dari residualnya dan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan taraf signifikan 0,05.

3.2 Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas (Ghozali, 2011:105) Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai $VIF = 1/Tolerance$. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* > 10 .

3.3 Uji Heterokedastisitas

Pada uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139) Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih

variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal antara dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, \dots, X_n) terhadap suatu variabel terikat (Y) (Yvonne Augustine dan Robert Kristaung (2013: 150). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan, sanksi pajak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu etika penggelapan pajak, adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + e$$

Dimana:

Y = Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak

X_1 = Keadilan

X_2 = Sistem Perpajakan

X_3 = Sanksi Perpajakan

a = Bilangan Konstanta

e = *error* yang ditolerir (5%)

5. Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji F, uji t dan uji Koefisien Determinasi (R^2)

5.1 Uji F

Model regresi linier berganda di atas, untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, maka dilakukan uji F. Uji F dilakukan dengan

tujuan untuk menguji keseluruhan variabel independen, yaitu: keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu perilaku penggelapan pajak. Secara bebas dengan signifikan sebesar 0,05, dapat disimpulkan (Ghozali, 2011:98).

- 1) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_o ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.
- 2) Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_o diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

5.2 Uji t

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu perilaku penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Apabila signifikan t lebih besar dari 0,05 maka H_o diterima. Demikian pula sebaliknya jika signifikan t lebih kecil dari 0,05, maka H_o ditolak. Bila H_o ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98).

5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, sistem perpajakan, sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap perilaku penggelapan pajak. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1, Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendeteksi 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).